

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Masalah kemiskinan di Indonesia hingga saat ini masih menjadi fokus utama pemerintah Indonesia. Masalah kemiskinan perlu segera diatasi demi tercapainya tujuan negara yaitu mensejahterakan rakyat. Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, Indonesia merupakan sebuah bangsa berkepulauan yang memiliki lebih dari 300 suku. Indonesia telah mampu memperlihatkan pertumbuhan ekonomi dengan baik sejak krisis finansial Asia di akhir 1990an. Menurut *World Bank* PDB nasional Indonesia nasional terus meningkat, dari \$857.807 pada tahun 2000 menjadi \$3.8747 pada 2018. Saat ini Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. *World Bank* juga menyatakan bahwa Indonesia yang merupakan anggota G-20 menempati urutan kesepuluh dalam hal ekonomi terbesar berdasarkan paritas daya beli. Tidak hanya itu masih menurut *World Bank*, Indonesia dinilai telah berhasil mengurangi kemiskinan lebih dari setengahnya sejak tahun 1999, menjadi 9,8% pada tahun 2018.

Di Indonesia sendiri menurut BPS dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami penurunan tingkat kemiskinan dari 16,66% pada tahun 2004 menjadi 10,96% pada 2014. Namun tingkat penurunan kemiskinan tersebut mulai mengalami perlambatan. Sebelumnya peningkatan terjadi sebesar 1,27% pada periode 2008-2009 kini setelah periode tersebut mulai terjadi perlambatan tingkat penurunan kemiskinan, pada 2011 hingga 2014 penurunan tingkat kemiskinan

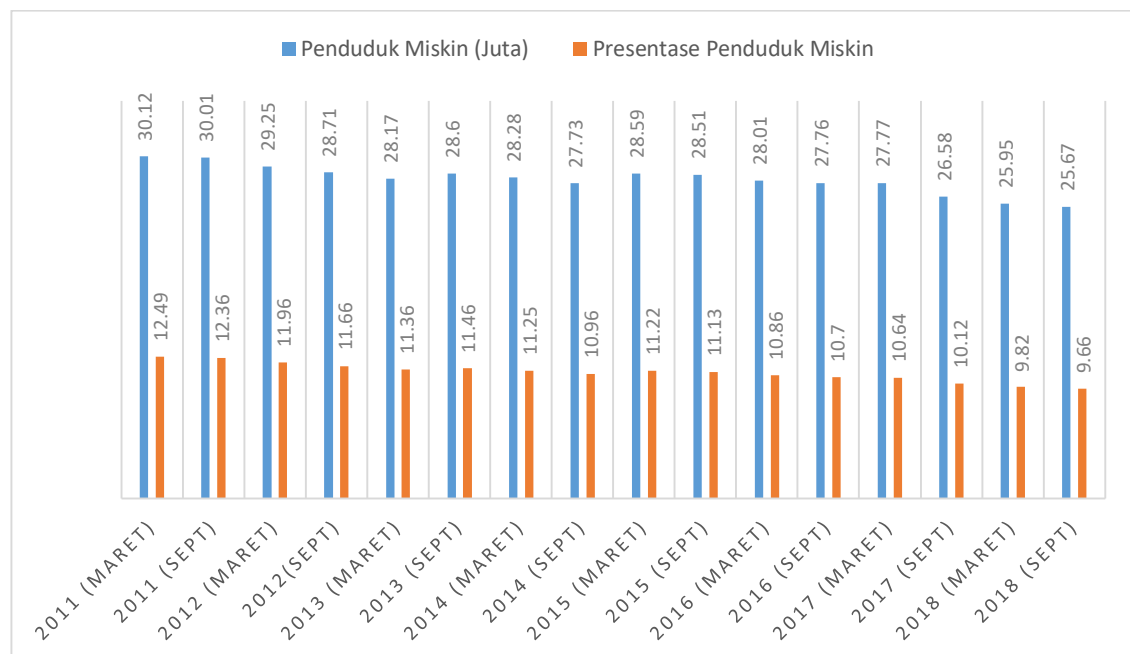
hanya berkisar 0,5% saja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 tingkat kemiskinan mencapai titik terendah selama hampir 2 dekade, yaitu sebesar 10,12 persen. Data menunjukkan per September 2017 persentase penduduk miskin Indonesia berkurang 0,58 persen poin (*year-on-year*). Dari sekitar 260 juta penduduk Indonesia, 25,9 jutanya masih diperkirakan hidup di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan data Maret 2017, sekitar 20.78% dari seluruh penduduk masih rentan jatuh miskin, hal ini dikarenakan pendapatan yang mereka peroleh hanya sedikit di atas garis kemiskinan.

Pada tahun 2018 persentase penduduk miskin pada september 2018 sebesar 9,66 persen menurun 0,16 persen poin terhadap Maret 2018 dan menurun 0,46 persen poin terhadap september 2017. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2018 sebesar 6,89 persen, turun menjadi 6,69 persen pada Maret 2019. Sementara persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada September 2018 sebesar 13,10 persen, turun menjadi 12,85 persen pada Maret 2019. Dibanding September 2018, jumlah penduduk miskin Maret 2019 di daerah perkotaan turun sebanyak 136,5 ribu orang (dari 10,13 juta orang pada September 2018 menjadi 9,99 juta orang pada Maret 2019). Sementara itu, daerah pedesaan turun sebanyak 393,4 ribu orang (dari 15,54 juta orang pada September 2018 menjadi 15,15 juta orang pada Maret 2019).

Garis kemiskinan pada Maret 2019 tercatat sebesar Rp 425.250,-/kapita/bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp 313.232,- (73,66 persen) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp 112.018,- (26,34 persen). Pada Maret 2019, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,68 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp1.990.170,-/rumah tangga miskin/bulan. Secara umum, pada periode 2005-

Maret 2019, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, perkecualian pada Maret 2006, September 2013, dan Maret 2015. Kenaikan jumlah dan Persentase penduduk miskin pada periode tersebut dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Berikut grafik tingkat kemiskinan Indonesia dari Maret 2011 hingga September 2018.

Gambar 1.1 : **Grafik Perkembangan Tingkat Kemiskinan Indonesia tahun 2011-2018**



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2018

Berdasarkan grafik diatas dapat kita lihat bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2018 mencapai 25,67 juta orang. Dibandingkan Maret 2018, jumlah penduduk miskin menurun 275,2 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2017 jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 908, 4 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada September 2018 tercatat sebesar 9,66 persen, menurun menjadi 0,16 persen poin terhadap Maret 2018 dan menurun 0,46 persen poin terhadap September 2017.

Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kemiskinan serta kesenjangan pendapatan (*income inequality*) masih menjadi perhatian banyak negara dan organisasi kerjasama regional-multilateral seperti G20, OECD, *the World Bank*, IMF, ADB, dan ASEAN. Berbagai kebijakan dirumuskan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Forum G20 untuk mengentaskan kemiskinan dan menurunkan disparitas pendapatan masyarakat adalah melalui system keuangan yang inklusif (*financial inclusion*).

Banyak penelitian empiris menunjukkan hubungan yang signifikan antara penguatan sektor keuangan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan kesejahteraan. Di samping itu, sistem keuangan yang inklusif berperan penting dalam pengentasan kemiskinan dan mengurangi perbedaan pendapatan. Khasnabis dan Mavrotas (2008) mengatakan bahwa mobilisasi yang efektif dari tabungan dalam negeri untuk investasi swasta memainkan peran kunci dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan. Oleh karena itu sebuah sistem keuangan yang efisien dan inklusif akan memberdayakan individu, memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Beberapa penelitian lain juga menekankan pentingnya keterkaitan antara penguatan sektor keuangan dan penurunan kemiskinan, misalnya studi oleh Beck et al (2007), Green et al (2006), dan Honohan (2004). Sementara itu Ahmad dan Malik (2009) mengatakan bahwa pengembangan sektor keuangan berpengaruh positif pada GDP per kapita melalui alokasi dana yang efisien dan meningkatkan output per pekerja serta dapat mengundang masuknya modal asing.

Faktor pengeluaran pemerintah bisa menjadi salah satu penyebab kemiskinan. Menurut Barika (2013), tingkat pengangguran menjadi salah satu penyebab kemiskinan. Semakin tinggi tingkat pengangguran maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan. Ketiadaan pekerjaan akan membuat seseorang tidak

mampu membiayai dirinya dan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan hidup layak sehingga akan tergolong pada kategori miskin.

Dari berbagai penyebab kemiskinan, alasan pertumbuhan ekonomi dan akses terhadap keuangan sangat berperan dalam pengentasan kemiskinan. Dampak keuangan terhadap kemiskinan sangat jelas bahwa terjadinya perubahan tingkat pendapatan sebagai akibat perubahan yang terjadi pada sektor keuangan akan mengarah ke perubahan tingkat kemiskinan. Strategi pengurangan kemiskinan lebih penting dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada negara-negara berkembang. Hal ini disebabkan fakta bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu meningkatkan kesejahteraan hidup orang miskin (Todaro, 1997).

Negara–negara berkembang sangat mementingkan perkembangan sektor keuangan dan memperdalam usaha mereka dalam pengentasan kemiskinan. Dengan memobilisasi tabungan, memfasilitasi pembayaran dan perdagangan barang dan jasa, dan mempromosikan alokasi sumber daya yang efisien. Disinilah sektor keuangan dinilai memiliki peran penting dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi secara langsung melalui perluasan akses ke keuangan dan secara tidak langsung melalui pertumbuhan dan berkontribusi untuk pengentasan kemiskinan.

Salah satu strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia adalah menekankan pada kebutuhan mobilisasi sumber daya untuk pencapaian penurunan kemiskinan. Namun sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan ini di luar kapasitas Negara baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, perkembangan substansial dalam sektor keuangan diharapkan mampu menarik sumber daya tersebut. Organisasi-organisasi internasional seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB) dan IMF telah lama mengembangkan sektor keuangan di Indonesia dalam menarik sumber daya asing untuk pengentasan kemiskinan (ADB, 2009).

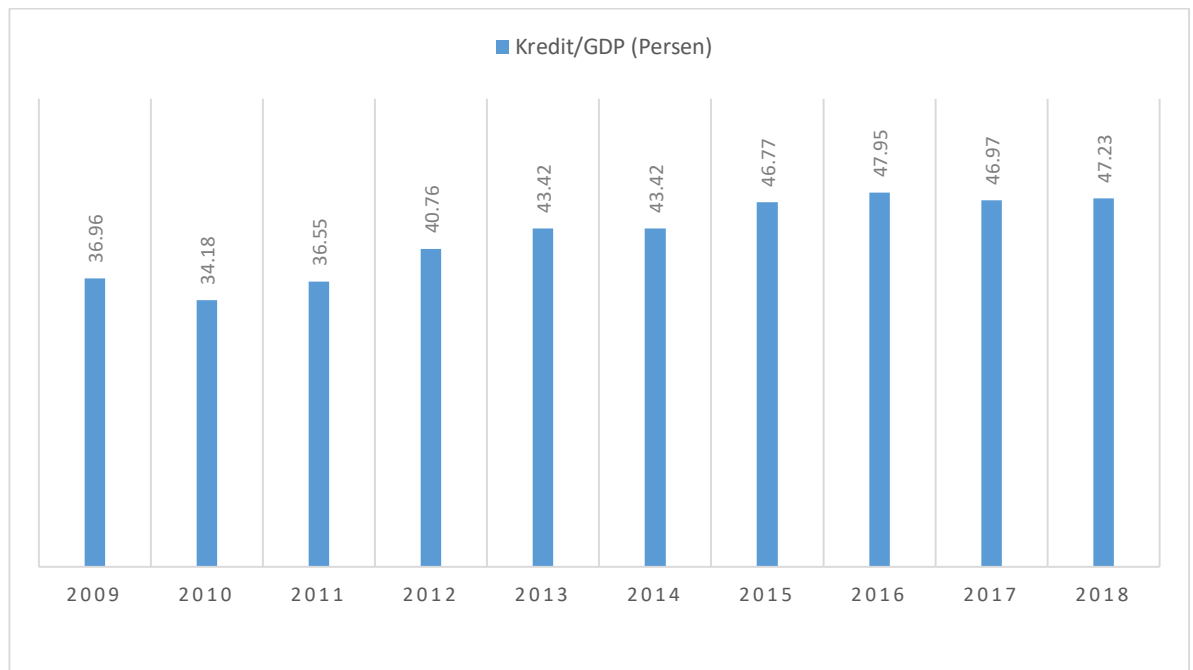
Di Indonesia, sektor keuangan dilakukan oleh dua lembaga yaitu lembaga perbankan dan lembaga non perbankan yang terdiri dari pasar modal, lembaga pembiayaan, asuransi, dana pensiun dan pegadaian. Sampai saat ini sektor keuangan masih didominasi oleh lembaga perbankan. Ruslan (2011) mengatakan bahwa perkembangan pendalaman keuangan di Indonesia lebih mencerminkan keberhasilan dari otoritas moneter dalam meningkatkan likuiditas dan monetisasi masyarakat melalui sektor perbankan.

Pada Negara-negara berkembang menurut Odhiambo (2009), adanya kenaikan rasio kredit swasta sebagai proksi pengukuran sektor keuangan yang disediakan perbankan sebesar 10 persen akan dapat mengurangi tingkat keiskinan 2,5 hingga 3 persen. Sementara Shahbaz et al. (2014) mengatakan bahwa sektor keuangan dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah sektor keuangan akan merangsang akumulasi modal dan memengaruhi aktivitas ekonomi, dampak selanjutnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan melalui aliran menetes ke bawah (*trickle down*) memengaruhi ketimpangan pendapatan. Sektor keuangan dapat menyediakan akses yang mudah bagi orang miskin untuk memperoleh sumber keuangan yang memungkinkan orang miskin dapat memulai usaha kecil dan akan menciptakan lapangan kerja serta dapat menurunkan ketimpangan pendapatan.

Pada tahun 2018 Otoritas Jasa Keuangan mencatat penyaluran kredit bank tumbuh sebesar 12,88 persen. Hasil tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan hasil 2 tahun terakhir yang hanya ada di kisaran 7,87 persen dan 8,24 persen pada tahun 2016 dan 2017. Ini merupakan kali pertama penyaluran kredit kembali mencicipi angka pertumbuhan dua digit setelah tahun 2015. Namun kendati demikian, bila dibandingkan dengan periode sebelumnya yakni pada tahun 2011-2013, pertumbuhan kredit pada tahun 2018 bisa terbilang rendah. Tercatat, pada tahun 2011 kredit tumbuh sebesar 24,59 persen, kemudian untuk tahun 2012

sebesar 23,08 persen, dan untuk tahun 2013 ada di angka sekitar 21,26 persen. Berikut adalah grafik perkembangan kredit domestik yang disediakan oleh sektor perbankan per GDP di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dalam bentuk persen.

**Gambar 1.2 : Grafik perkembangan kredit domestik yang disediakan oleh sektor perbankan per GDP di Indonesia tahun 2009-2018**



Sumber : World Bank , (2018)

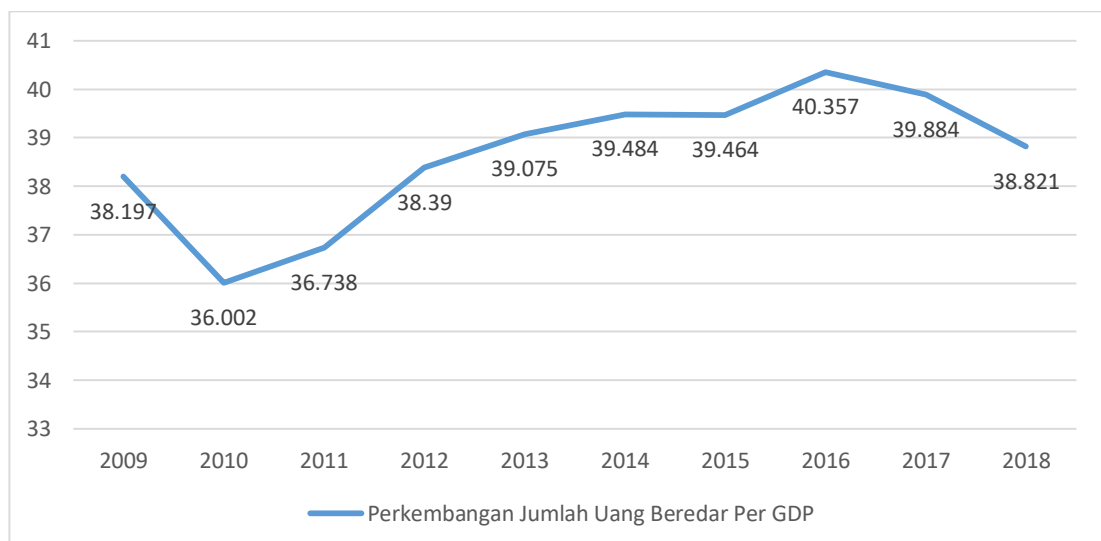
Berdasarkan grafik diatas dapat kita lihat bahwa perkembangan kredit domestik oleh sektor perbankan bisa dikatakan stabil. Meskipun sempat turun 2 poin pada tahun 2009 ke tahun 2010, namun ditahun berikutnya kembali meningkat hingga tahun 2014 sebesar 43,42 persen.

Negara –negara berkembang sangat mementingkan perkembangan sektor keuangan dan memperdalam usaha mereka dalam pengentasan kemiskinan. Dengan memobilisasi tabungan, memfasilitasi pembayaran dan perdagangan barang dan jasa, dan mempromosikan alokasi sumber daya yang efisien. Disinilah

sektor keuangan dinilai memiliki peran penting dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi secara langsung melalui perluasan akses ke keuangan dan secara tidak langsung melalui pertumbuhan dan berkontribusi untuk pengentasan kemiskinan.

Menurut Lynch (1996) terdapat beberapa indikator untuk mengetahui seberapa besar tingkat perkembangan sektor keuangan. Beberapa indikator tersebut seperti indikator kuantitatif, indikator struktural, indikator harga sektor keuangan, indikator skala produk dan indikator biaya transaksi. Di antara indikator-indikator tersebut, indikator kuantitatif merupakan indikator yang sering digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat perkembangan sektor keuangan suatu negara. Berkaitan dengan indikator kuantitatif untuk melihat perkembangan sektor keuangan dalam pembangunan, maka perkembangannya dapat diukur dengan menggunakan rasio antara aset keuangan dalam negeri terhadap GDP (seperti rasio M1/GDP, M2/GDP, M3/GDP, M4/GDP). Dalam grafik berikut bisa kita lihat perkembangan sektor keuangan Indonesia dalam 10 tahun terakhir .

**Gambar 1.3 : Grafik Perkembangan Jumlah Uang Beredar Indonesia (Persen) per GDP Tahun 2009-2018**



Sumber : World Bank, (2018)



Berdasarkan grafik diatas, dapat kita lihat perkembangan jumlah uang beredar per gdp Negara Indonesia, terjadi penurunan pada tahun 2010 yakni sebesar 36.00 % . namun setelah itu terus terjadi peningkatan dimulai pada tahun 2011 sebesar 36.73% hingga tahun 2014 dengan nilai sebesar 39.48 %. Angka tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun ini terletak pada tahun 2016 yakni sebesar 40.35% meskipun 2 tahun setelahnya yakni tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan.

Pentingnya peran sektor keuangan untuk memberantas kemiskinan telah banyak diakui, pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perkembangan sektor keuangan akan dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Beberapa studi yang telah mengkaji hal tersebut diantaranya Beck et al. (2007). Odhiambo (2009), Uddin et al. (2014), Moreno (2011), Abosedra et al. (2015), Dhrifi (2014) dan Shahbaz (2014). Namun penelitian sejenis belum banyak dilakukan di Indonesia.

Giri (2016) meneliti hubungan antara perkembangan sektor keuangan, pertumbuhan ekonomi, dan penurunan tingkat kemiskinan di India dengan menggunakan variabel konsumsi per kapita sebagai *proxy* untuk menunjukkan tingkat penurunan kemiskinan, rasio kredit/GDP dan rasio m3/GDP sebagai *proxy* untuk kondisi perkembangan sektor keuangan, tingkat pertumbuhan ekonomi dijelaskan dengan menggunakan GDP riil per kapita, dan juga variabel indeks harga konsumen India untuk melihat kestabilan ekonomi makro di India. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah terdapat hubungan jangka panjang antara variabel kemiskinan, perkembangan sektor keuangan, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi. Hubungan terjadi baik ketika indikator kredit/GDP dijadikan sebagai indikator perkembangan sektor keuangan maupun saat indikator m3/GDP yang digunakan.

Sementara itu, dalam jangka pendek, variabel perkembangan sektor keuangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Namun, variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap penurunan kemiskinan dalam jangka pendek sehingga bisa dikatakan bahwa jalur tidak langsung, atau melalui pertumbuhan ekonomi, yang dianggap lebih kuat untuk mempengaruhi penurunan kemiskinan di India.

Perkembangan sektor keuangan dapat juga dilihat melalui peningkatan jumlah nilai transaksi non tunai, karena dengan hal tersebut dapat diartikan bahwa masyarakat sekarang semakin sering melakukan transaksi non tunai yang lebih praktis dan efisien. Hal tersebut berarti bahwa transaksi ekonomi yang ada di masyarakat semakin hari semakin tinggi. Pramono et al. (2006) menyatakan bahwa kehadiran alat pembayaran non tunai bagi perekonomian memberikan manfaat peningkatan efisiensi dan produktifitas keuangan yang mendorong aktivitas sektor riil dan selanjutnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diindikasikan oleh peningkatan *velocity of money*.

Penelitian mengenai pengaruh sektor keuangan dan kemiskinan masih jarang ditemui, khususnya di Indonesia. Umumnya peneliti hanya menyoroti pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia tetapi tidak fokus terhadap sektor keuangan dan kemiskinannya. Penelitian sebelumnya juga masih terlalu luas, seperti hanya meneliti pengaruh kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonominya. Tidak memfokuskan pada sektor keuangan, dengan melihat berbagai indikator yang bisa mencerminkan sektor keuangan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh antara sektor keuangan terhadap kemiskinan di Indonesia, disini peneliti ingin melihat apakah sektor keuangan memiliki pengaruh terhadap kemiskinan.

Jika pada penelitian-penelitian sebelumnya, ada banyak berbagai macam indikator yang dibuat untuk mengindikasikan sektor keuangan, diantaranya rasio  $m2/pdb$  dan kredit sektor swasta/ $pdb$ . Indikator-indikator ini adalah indikator bersifat moneter yang telah dijelaskan oleh Lynch. Oleh karena itu, dalam penelitian kali ini penulis ingin menggunakan indikator lain sebagai proksi dari

sektor keuangan. Ketiga indikator tersebut adalah rasio Private Credit/GDP yang diperoleh dari dana pihak ketiga bank yakni giro, tabungan, dan deposito, kemudian rasio Liabilities Liquid/GDP yang diperoleh dari M3/GDP, dan yang terakhir adalah rasio Bank Concentration/Total Aset keseluruhan bank jika pada penelitian sebelumnya yaitu penelitian Jamel (2016) menggunakan tiga aset bank tertinggi, namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan total aset bank-bank BUMN terhadap total aset secara keseluruhan. Alasan peneliti menggunakan total bank-bank BUMN adalah untuk melihat apakah dengan kepemilikan 51% saham yang dimiliki oleh pemerintah, apakah hal ini memberikan pengaruh terhadap pengurangan kemiskinan.

Pada penelitian ini penulis juga akan menggunakan metode yang berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu menggunakan analisis linier berganda *Ordinary Least Square* (OLS) sehingga nantinya akan didapat hasil penelitian berupa seberapa besar pengaruh setiap indikator dari perkembangan sektor keuangan terhadap kemiskinan di Indonesia. Untuk indikator kemiskinan di Indonesia, peneliti menggunakan indikator tingkat pengeluaran per kapita rumah tangga di Indonesia. Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat dijadikan rujukan mengenai sektor-sektor mana saja yang memiliki potensi untuk menjadi sektor yang mampu mempengaruhi pengurangan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai peran sektor keuangan dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Karena penelitian tersebut masih jarang dilakukan. Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penelitian ini mengambil judul **“Analisis Pengaruh Sektor Keuangan Terhadap Kemiskinan di Indonesia”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah sektor keuangan memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sektor keuangan terhadap kemiskinan di Indonesia.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

### **1.4.1 Manfaat Akademis**

- Dapat memberikan kontribusi berupa bukti empiris tentang Pengaruh Sektor Keuangan Terhadap Kemiskinan di Indonesia.
- Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya, sehingga dapat melanjutkan studi ini.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi otoritas moneter. Manfaat praktis tersebut adalah:

- Dapat mengukur Pengaruh Sektor Keuangan Terhadap Kemiskinan di Indonesia.

